

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, pemerintah daerah membutuhkan dana agar setiap kebutuhan dan kegiatannya dapat berjalan sebagaimana semestinya. Agar penerimaan pemerintah terjamin, maka setiap daerah harus memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Fithrah,2015:6).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam (Fithrah,2015:7).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi ini diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, mengidentifikasi potensi sumber-

sumber pendapatannya serta dalam mengelola pembangunan didaerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 kewenangan daerah menjadi lebih luas dalam mengatur pemerintahannya sendiri, kecuali 7 (tujuh) bidang tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pengembangan pada daerah kabupaten maupun kota menurut undang-undang tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemerintah berhak melakukan pungutan sesuai dengan undang-undang Untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Penerimaan pemerintah daerah yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah dan retribusi daerah, sumbangan pajak bagi anggaran pendapatan pemerintah sangat besar. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak salah satunya dengan memperbaiki sistem perpajakannya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan, ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor dan mengoptimalkan seluruh potensi pajak yang tersedia, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat setiap tahunnya (Amran,2015:10).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari daerah perlu ditingkatkan agar dapat membantu memikul sebagian beban yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 sebagai

pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bersumber dari:

- 
1. Pendapatan Asli Daerah
    - a. Pajak Daerah
    - b. Retribusi Daerah
    - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - d. Lain-Lain PAD yang sah
  2. Dana Perimbangan
    - a. Dana Bagi Hasil
    - b. Dana Alokasi Khusus
    - c. Dana Alokasi Umum
  3. Lain-lain PAD yang sah

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Dana Cadangan Daerah
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, dividen dan penjualan saham milik daerah serta lain-lain PAD yang sah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sektor Pendapatan Asli Daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan, beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda dengan daerah yang masih terpencil yang tidak punya pendapatan dari sektor pariwisata (fithrah,2015:12).

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah di Kota Bukittinggi dipungut langsung oleh bendaharawan pemerintah dan juga wajib pajak bisa membayar langsung di Pos atau Bank Presepsi dimana wajib pajak tersebut berada.

Potensi-potensi pendapatan daerah yang ada di Kota Bukittinggi masih bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian Kota Bukittinggi melalui pembangunan sarana dan prasarana yang

menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan terbesar pemerintah Kota Bukittinggi berasal dari penerimaan retribusi daerah. Berikut adalah gambaran target dan realisasi Retribusi Daerah Kota Bukittinggi tahun 2010-2014:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2010-2014**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2010	12.932.615.675	11.330.906.732
2011	16.806.931.722	12.951.894.643
2012	17.454.641.811	14.935.146.711
2013	19.170.690.049	16.757.443.119
2014	20.500.506.821	18.043.486.304

*Sumber: DPPKA Kota Bukittinggi Tahun 2010-2014*

Melalui tabel 1.1 dapat diketahui target penerimaan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi selalu meningkat dari tahun 2010 sampai 2014, hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Namun realisasi penerimaan retribusi masih belum mencapai target, terutama pada tahun 2011 dimana realisasi penerimaan retribusi terhadap target paling rendah dari tahun 2010 sampai 2014. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi selaku perangkat daerah bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah dan semestinya mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah Kota Bukittinggi yang walaupun masih disadari terdapat beberapa kendala yang ada di lapangan.

Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang tersebut, realisasi penerimaan retribusi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik skripsi guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka penelitian ini memilih judul **"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Bukittinggi"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana kontribusi tiap jenis retribusi daerah terhadap total penerimaan retribusi daerah di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kontribusi tiap jenis Retribusi Daerah terhadap total penerimaan Retribusi Daerah di Kota Bukittinggi
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Bagi Akademis

Dalam penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota bukittinggi.

#### 2. Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru serta aplikasi langsung di dalam memahami materi efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota Bukittinggi.

#### 3. Manfaat Bagi Pembaca atau Masyarakat

Penulisan ini dapat memberikan informasi mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota Bukittinggi.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat lebih mempermudah dan mendapatkan gambaran yang jelas dari isi penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

### BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori-teori yang mendukung dalam analisis perumusan masalah. Bab ini juga akan menjelaskan kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti.

### BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang objek penelitian, jenis data, jenis penelitian, dan metode analisis data yang digunakan.

### BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini memperlihatkan metode-metode analisis data yang dilakukan selama penelitian serta hasil dan pembahasannya.

### BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil analisa data serta berisi juga saran-saran yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian selanjutnya.